

PRAKIRAAN
CUACA HARI INI

PASER	KUKAR	BERAU
Hujan Petir	Hujan Ringan	Berawan
KUKAR	KUTIM	PPU
Hujan Petir	Berawan	Hujan Ringan
MAHULU	BALIKPAPAN	SAMARINDA
Cerah Berawan	Hujan Ringan	Hujan Ringan
BONTANG		
Hujan Ringan		

SUMBER: BMKG.GO.ID

Aturan PPLH
Mulai Berlaku
Tahun Depan

SAMARINDA – Setelah resmi disahkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur memastikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) akan mulai diterapkan pada tahun depan.

Aturan baru ini sekaligus menggantikan dua perda lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi dan regulasi terbaru. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Kaltim, Muhammad Hamidin, menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan perda tersebut berasal langsung dari DLH.

“Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan nasional,” ujar Hamidin, Jumat (21/11).

Menurut Hamidin, keberadaan PP 22/2021 membuat dua perda sebelumnya yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Perda Nomor 1 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tidak lagi sesuai.

“Dengan adanya perda baru ini, kita punya kepastian hukum yang selaras dengan regulasi pusat. Semua pengaturan akan mengacu pada PP 22, sehingga pengelolaan lingkungan hidup di Kaltim bisa berjalan lebih efektif,” ucapnya.

Ia menambahkan, meski perda lama dicabut, seluruh aspek penting seperti larangan, pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar tetap diakomodasi dalam aturan baru. Sanksi administratif dan ketentuan teknis lainnya kata Hamidin, akan dijabarkan lebih lengkap dalam aturan turunan yang segera disiapkan.

Hamidin menegaskan, dengan standar baru tersebut, pemerintah berharap seluruh aktivitas industri dan kegiatan masyarakat dapat terkontrol lebih baik, terutama terkait kualitas air dan pencemaran lingkungan.

“Perda ini sifatnya menyeluruh, mengakomodasi kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Tahun depan sudah mulai kita terapkan,” katanya.

Hamidin menuturkan, DLH Kaltim kini tengah menyiapkan seluruh perangkat pendukung agar implementasi perda tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.

“Mulai dari Sosialisasi ke berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat juga akan dilakukan menjelang pemberlakuan resmi tahun depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, DPRD Kaltim memastikan hasil pembahasan pansus Perda PPLH akan segera dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah proses fasilitasi selesai, rancangan tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (su/han/mm)

Sampaikan 17 Raperda Prioritas dalam Propemperda 2026

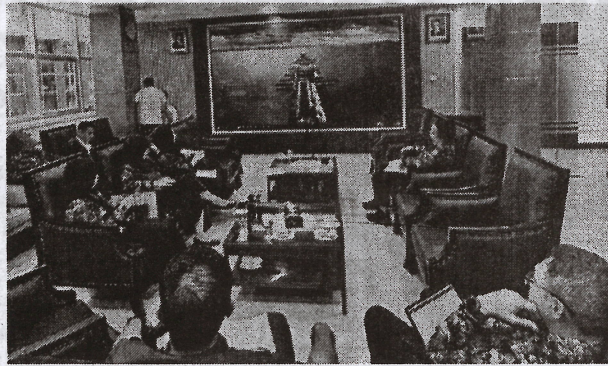
Bapemperda DPRD Kukar Ikuti Rapat Asistensi Supervisi

TENGGARONG – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri mengadakan Rapat Asistensi dan Supervisi Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 di ruang rapat Mulawarman kantor Bupati Kutai Kartanegara melalui Join Zoom Meeting, Senin (17/11).

Rapat ini diikuti Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Kukar, Purnomo beserta Kabag Perundangan dan Persidangan Sekretariat DPRD, Nurhayati Touristiany yang mendampingi Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar.

Kegiatan bertujuan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah berdasarkan Pasal 373 dan Pasal 374 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peningkatan kualitas kebijakan daerah yang implementatif dan berpihak terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai program strategis nasional.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-



DOK/ JDIH DPRD KUKAR

RAPAT ASISTENSI: Bapemperda DPRD Kukar bersama bagian hukum saat mengikuti rapat asistensi supervisi.

perda) adalah instrumen perencanaan tahunan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh DPRD dan kepala daerah untuk menentukan rancangan peraturan daerah (Raperda).

Fungsi dan tujuan Propemperda sebagai rencana kerja legislasi daerah dalam satu tahun anggaran, sehingga proses penyusunan peraturan daerah lebih terarah dan efektif. Di dalamnya ada skala prioritas yang menentukan raperda yang paling prioritas untuk disusun, berdasarkan dari berbagai pertimbangan. Memastikan selaras dengan hukum nasional, rencana

pembangunan jangka panjang daerah, otonomi daerah, serta aspirasi masyarakat.

Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah mengatakan proses penyusunan Propemperda disusun oleh Bapemperda yakni antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun yang ditetapkan melalui keputusan DPRD.

“Pada rapat asistensi supervisi kemarin kami menyampaikan ada 17 judul Raperda yang akan dibahas pada tahun anggaran 2026 yang masuk ke dalam Propemperda 2026,” kata Johansyah. (hei/han/mm)

ADAPUN 17 RAPERDA TERSEBUT DI ANTARANYA:

1. Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual.
3. Raperda Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
4. Perubahan Perda No.7 tahun 2023 tentang RTRW.
5. Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
6. Raperda APBD-P tahun 2026.
7. Raperda APBD Tahun 2027.
8. Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2025-2045.
9. Raperda Peran Serta Dunia Usaha dalam kemajuan Destinasi Wisata Hiburan & Pariwisata.
10. Raperda Perubahan Perda No.11 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
11. Raperda Pembentukan & Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Raperda Dana Cadangan Daerah.
13. Raperda Riset & Inovasi Daerah.
14. Raperda Penyelenggaraan Urusan Pechubungan.
15. Raperda Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
16. Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 2026-2045.
17. Perda tentang Pelaksana UU No.1 tahun 2023 tentang KUIHP (Metode Omnibus).

Seno Intruksikan Percepatan
Tender Pekerjaan di Awal Tahun

Pastikan Serapan Anggaran Bisa Berjalan Sesuai Target

SAMARINDA

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan, mulai tahun 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim harus memulai proses tender atau pengadaan lebih awal, tepatnya di awal tahun anggaran.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat serapan anggaran dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai target.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun pertama masa kepemimpinan pasangan kepala daerah yang masih tergolong rendah.

Seno menyebut, percepatan proses pengadaan menjadi langkah penting agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun. “Sejumlah OPD yang memiliki pagu anggaran besar harus mulai menyiapkan proses tender maupun penggunaan e-katalog

lebih cepat,” ujar Seno.

Menurutnya dengan begitu, kegiatan pembangunan dapat langsung berjalan setelah tahun anggaran dimulai. Seno mengatakan, percepatan tersebut akan berdampak

langsung pada peningkatan serapan anggaran sehingga tidak ada dana yang mengendap dan seluruh program prioritas dapat terlaksana.

“Oleh karena itu kita berharap target prognosis penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 94 hingga 95 persen,” ucapnya.

Seno juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja OPD. Evaluasi dilakukan setiap minggu untuk memastikan tidak ada unit kerja yang tertinggal dalam progres pelaksanaan program.

“OPD yang masuk kategori merah atau lambat dalam realisasi anggaran, akan didorong dan diberikan pendampingan supaya mampu mengejar ketert-



ILUSTRASI/NET

inggalan hingga akhir tahun,” katanya.

Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki pola kerja sekaligus meminimalisir potensi keterlambatan pembangunan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Kaltim mengadopsi pola pengelolaan anggaran ala DKI Jakarta yang memulai tender pada

akhir tahun sebelumnya, Seno menyebut hal tersebut bisa saja diterapkan. “Pemprov Kaltim memang sedang mempertimbangkan model pengadaan lebih awal tersebut agar pelaksanaan pembangunan dapat dimulai tanpa menunggu lama,” terangnya.

Kendati demikian, Seno memastikan kebijakan itu

akan disesuaikan dengan kesiapan OPD serta aturan penganggaran yang berlaku. Pemerintah juga tidak ingin tergesa-gesa tanpa perencanaan yang solid.

“Kalau memungkinkan, sebelum akhir Desember kita sudah mulai melaksanakan proses pengadaannya,” jelasnya. (su/han/mm)